

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SWARA KARYA	3	26-8-2002

# Ketika Pertamina Ikut "Mengamankan" Daerah Konflik

Konflik di sejumlah daerah di Tanah Air menorehkan kerugian yang sangat besar bagi Pertamina. Sudah tak terhitung lagi jumlah aset Pertamina yang ikut hancur. *Toh BUMN migas ini tetap teratur melayani masyarakat. Kok bisa?*

**B**egitu genting dan berbahaya kondisi suatu daerah, ternyata tak menyurutkan tekad Pertamina untuk menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat daerah bersangkutan.

Itu tiada lain karena Pertamina mengemban penugasan dari pemerintah seperti tertuang dalam Undang-undang (UU) No 44 Tahun 1960 dan UU No 8 Tahun 1971. Bahkan sesuai Pasal 26 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), BUMN ini masih harus menyediakan dan mendistribusikan BBM kepada masyarakat hingga tahun 2005.

Seperti diketahui, saat ini beberapa wilayah di Tanah Air, seperti di Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam/NAD), Poso (Sulawesi Tengah), dan Ambon masih terlibat konflik yang belum juga berujung. Tapi demi menjalankan tugas dan menjamin *security of supply* (keamanan pasokan) BBM, mau tidak mau petugas Pertamina pun harus tetap masuk ke jantung konflik untuk menyalurkannya.

Bahkan, oleh Pertamina, daerah konflik ini justru dijadikan prioritas sehingga banyak pekerja Pertamina yang tidak pernah angkat kaki meski begitu gentingnya situasi di daerah tersebut.

### Gandeng TNI/Polri

Dalam mendistribusikan di wilayah NAD, misalnya. Untuk menjamin kelancaran pendistribusiannya, Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) I menggandeng aparat keamanan, baik dari unsur TNI maupun Polri. Apalagi selama ini setiap BBM yang akan didistribusikan melalui mobil-mobil tangki milik Pertamina selalu dijarah dan dirampok orang-orang bersenjata dari kelompok tertentu.

Maka tak tanggung-tanggung, demi mengamankan pasokan, mobil-mobil tangki BBM tersebut dikawal menggunakan mobil panser. Itu belum termasuk 20 personel tentara yang berada di dalam dua mobil truk. "Ini dilakukan kita karena ingin memberikan ekstra pengamanan terhadap mobil-mobil tangki BBM itu,"

ujar Kepala Penjualan UPMS I, M Zaini.

Strategi ini ternyata cukup efektif. Seperti dituturkan Kepala Hupmas UPMS I, Juliadi, melalui pengawalan yang ketat dari aparat keamanan terhadap konvoi mobil tangki BBM, pendistribusian BBM di wilayah itu menjadi lebih lancar.

Sebelumnya, gangguan keamanan yang kerap terjadi—baik berupa penyanderaan maupun intimidasi terhadap sopir serta pengambilan dan pembakaran mobil tangki BBM—mengakibatkan kelangkaan BBM di daerah bersangkutan, yang pada akhirnya membuat harga BBM di wilayah itu menjadi lebih mahal.

dan Antargolongan). Selain itu, dalam menyalurkan dan mendistribusikan BBM di wilayah tersebut, UPMS VII membentuk Tim Satgas yang berfungsi menggantikan tim reguler yang selama ini menyalurkannya.

Menurut penuturan Kepala Hupmas UPMS VII, Winarto, pembentukan Tim Satgas itu dilakukan karena tekanan dan kondisi keamanan yang sangat berat membuat tim yang selama ini menyalurkan BBM di wilayah itu (tim reguler) tidak dapat bekerja secara terus-menerus.

Pada awal kerusuhan, penyaluran BBM untuk wilayah itu sama sekali terhenti, menyusul tidak beroperasinya mobil-mobil tang-

lancar. Bahkan setelah adanya Perjanjian Malino I, keadaan semakin membaik dari waktu ke waktu. Meski pada akhir Juli 2002 lalu sempat terjadi peledakan bom di dalam bus kota, itu tidak berpengaruh terhadap pendistribusian BBM.

Begitu pun dengan Pertamina UPMS VIII wilayah kerja Ambon. Di daerah konflik yang telah berlangsung sekitar tiga setengah tahun ini, selain menggandeng aparat keamanan dalam menyalurkan BBM ke wilayah konflik, Pertamina menempuh strategi baru, di mana jalur distribusi BBM yang sebelumnya dilakukan melalui darat, dipindahkan ke laut yaitu dengan menaikkan



**DAERAH KONFLIK**—Gedung Serbaguna Pertamina cabang Ambon yang tinggal puing setelah dibakar massa saat terjadi kerusuhan. Meski berbagai fasilitas Pertamina di daerah konflik banyak yang hancur, BUMN ini tetap memasok BBM untuk masyarakat. (Suara Karya/Int)

"Tapi dengan menggandeng aparat keamanan, distribusi BBM seperti premium, solar, dan minyak tanah yang kita ambil dari Lhokseumawe menjadi lebih lancar," tutur Juliadi.

Kerjasama dengan aparat keamanan ini juga dilakukan Pertamina UPMS VII, khususnya wilayah kerja Depot Poso yang saat ini menghadapi kerusuhan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras,

ki karena alasan keamanan. Sementara upaya mengalihkan *supply point* dari Depot Poso ke depot terdekat seperti Depot Kolonedale, Depot perigi, dan Depot Ampana juga tidak memungkinkan akibat tertutupnya jalur masuk wilayah itu.

Namun setelah kerjasama dengan aparat keamanan terjalin, penyaluran dan pendistribusian BBM untuk wilayah itu mulai

mobil-mobil tangki pengangkut BBM ke atas *tugboat*. "Berbagai upaya kita lakukan agar BBM sampai ke tangan konsumen," ujar *General Manager* UPMS VIII, Sustiadji.

Konflik bernuansa agama di wilayah Ambon pertamakali meletus pada 19 Januari 1999, sehingga sampai saat ini sedikitnya 15 batalyon TNI/Polri ditempatkan di Provinsi Maluku ini

# GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

guna meredam kerusuhan tersebut.

Banyak pula aparat keamanan yang kemudian diperbantukan di wilayah kerja Pertamina Cabang Ambon. Anehnya, seperti penuturan Kepala Hupmas UPMS VIII, Syaiful Bahri, justru banyak oknum aparat yang membuat ulah hingga menimbulkan kerusakan terhadap aset Pertamina. Bahkan ada oknum petugas keamanan yang melakukan pemukulan terhadap pegawai Pertamina.

Dalam situasi yang benar-benar tidak kondusif tersebut, pengangkutan BBM bagi konsumen dan lembaga penyalur dilakukan estafet melalui jalur jalan laut dan darat yang teraman.

Sampai saat ini, sejumlah Stasiun Pengisian BBM untuk Umum (SPBU) yang rusak di wilayah itu belum berhasil dioperasikan. Bahkan sejak kerusuhan Juni 2000 lalu, tiga unit SPBU sama sekali tidak bisa dioperasikan akibat belum amannya jalan darat untuk memasok BBM ke lokasi tersebut.

"Untuk salah satu SPBU, kondisi lingkungannya sudah sangat tidak layak dan relatif tidak aman untuk dilalui mobil tangki BBM. Sedangkan satu SPBU, selain kondisi lingkungannya tidak layak, SPBU-nya sendiri dalam kondisi rusak berat," tutur Syaiful.

Bekerja di daerah-daerah konflik tentu menjadi pengalaman tersendiri bagi para pekerja Pertamina, walau tiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang jelas, dari sinilah sebenarnya keandalan dan kesiapan Sumber Daya Manusi (SDM) Pertamina diuji, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dan pengalaman-pengalaman ini tentu akan menjadi bekal, baik bagi pegawai itu sendiri maupun bagi Pertamina secara umum dalam memasuki era liberalisasi sektor migas, termasuk bisnis BBM yang memang telah terbuka setelah disahkan dan undangannya UU Migas yang baru.

Dalam persaingan tersebut dapat dipastikan hanya mereka yang siap, berpengalaman, dan tahan terhadap setiap tantanganlah yang bakal keluar sebagai pemenang. (Eman Sanusi)